



Kesbangpol Ingatkan Bikin Laporan ke BPK

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat menyalurkan senilai Rp 1, 050 miliar dana bantuan keuangan untuk 10 partai politik (parpol) di wilayah tersebut, Selasa (13/6). Bantuan keuangan itu salah satu wujud pembinaan pemerintah terhadap eksistensi partai politik.

Wakil Bupati Kapuas Hulu Wahyudi Hidayat, menjelaskan bantuan keuangan tersebut juga merupakan amanah dari konstitusi, yang bersumber dari APBD Tahun 2023 yang diberikan secara proporsional berdasarkan suara yang diraih pada Pemilu 2019.

Menurutnya, partai politik mempunyai kontribusi yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan nasional.

"Jika kapasitas dan kinerja partai politik meningkat, akan berpengaruh besar terhadap peningkatan kualitas demokrasi dan kinerja sistem politik," katanya.

Terkait bantuan keuangan tersebut, ia menekankan agar partai politik yang me-

nerimanya dapat menggunakan dana itu dengan prinsip berhati-hati dan bisa dipertanggungjawabkan sebab akan diperiksa oleh BPK.

"Bantuan itu harus bisa dipertanggungjawabkan, makanya harus berhati-hati dalam penggunaannya," pinta Wahyudi.

Dia berharap partai politik yang menerima bantuan keuangan dapat semakin meningkatkan kontribusi dalam pembangunan di wilayah Kapuas Hulu, sebab dalam membangun daerah pemerintah tidak bisa bekerja sendiri.

10 partai politik yang menerima bantuan keuangan dari pemerintah daerah yaitu parpol yang mempunyai kursi di DPRD Kabupaten Kapuas Hulu seperti PKB, Gerindra,



BANTUAN - Wakil Bupati Kapuas Hulu Wahyudi Hidayat saat menyerahkan bantuan keuangan partai politik di wilayah Kapuas Hulu,

PDI Perjuangan, Golkar, Nasdem, Hanura, PAN, PPP, Demokrat dan PKPI.

Kepala Kesbangpol Kabupaten Kapuas Hulu, Muhtarudin menyatakan, kalau pihaknya telah menyerahkan bantuan keuangan ke 10 Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD Kapuas Hulu.

"Bantuan keuangan ke Partai Politik tersebut berdasarkan undang-undang yang berlaku, dan bersum-

ber dana dari APBD tahun 2023 sebesar Rp 1,050 miliar," ujarnya.

"Diharapkan bantuan ini dapat menjadi stimulan bagi partai politik, guna meningkatkan kualitas sumber daya partai, dan dapat dimanfaatkan sebaik baiknya dengan prinsip efektif, efisien dan ekonomis sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku," ucapnya lagi. **(sahirul)**